

PENGARUH KAPASITAS APARATUR DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA PADA PROGRAM KETAHANAN PANGAN

**Delpi Susanti¹, Afrizal², Musthofa Habli³, Andi Putra⁴, Doni Syahputra⁵
Gusmansyah⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Rokania

delpisusanti@rokania.ac.id

ABSTRACT; *The utilization of Village Funds as an instrument to support rural development and food security requires adequate capacity of village apparatus so that governance can run effectively, accountably, and sustainably. The capacity of village apparatus is reflected through their competencies in participatory planning, village financial management, transparency, accountability, and the ability to build multi-actor collaboration in supporting food security based on local potential. This study aims to analyze the influence of village apparatus capacity on the effectiveness of Village Fund utilization in food security programs in Rokan Hulu Regency. This research employs a descriptive qualitative approach, with data obtained through participatory observations, in-depth interviews with village officials and beneficiary groups, as well as documentation analysis of Village Fund planning and realization. The findings indicate that villages with higher apparatus capacity particularly in participatory planning, transparent financial management, and community collaboration tend to demonstrate better effectiveness in the utilization of Village Funds, reflected in accurate program targeting, improved program implementation quality, and sustainability of food security initiatives at the village level. Moreover, the implementation of transparency, accountability, and public participation principles in Village Fund governance has been proven to strengthen financial governance and increase public trust and participation in food security programs (Anirwan & Irawansyah, 2022; Susanti et al., 2025). Conversely, villages with low apparatus capacity face obstacles such as poor financial documentation, limited public access to information, and low community involvement, resulting in suboptimal outcomes a condition consistent with studies showing that inadequate transparency and public participation reduce the contribution of Village Funds to community welfare. Based on these findings, this study recommends strengthening village apparatus capacity through technical and managerial training, improved accessibility and transparency of village financial information, and enhanced participatory and collaborative mechanisms with the community. These efforts are expected to improve the effectiveness of food security programs funded by Village Funds and contribute to inclusive and sustainable rural development.*

Keywords: *Village Apparatus Capacity, Village Fund, Food Security, Transparency, Accountability, Public Participation.*

ABSTRAK; Pemanfaatan Dana Desa sebagai instrumen pembangunan pedesaan untuk mendukung ketahanan pangan membutuhkan kapasitas aparatur desa yang memadai agar tata kelola pembangunan dapat berlangsung efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Kapasitas aparatur desa mencakup kompetensi pada aspek perencanaan partisipatif, pengelolaan keuangan desa, transparansi, akuntabilitas, serta kemampuan untuk menjalin kolaborasi multi-aktor dalam mendukung ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam program ketahanan pangan di Kabupaten Rokan Hulu. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan perangkat desa dan penerima manfaat, serta analisis dokumentasi rencana dan realisasi program Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa dengan aparatur yang memiliki kapasitas lebih tinggi terutama dalam perencanaan partisipatif, transparansi pengelolaan keuangan, dan kolaborasi dengan masyarakat cenderung menunjukkan tingkat efektivitas pemanfaatan Dana Desa yang lebih baik, terbukti dengan ketepatan sasaran program, kualitas pelaksanaan, serta keberlanjutan kegiatan ketahanan pangan di tingkat desa. Selain itu, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan Dana Desa terbukti memperkuat tata kelola keuangan desa serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap program (Anirwan & Irawansyah, 2022; Susanti & kawan-kawan, 2025). Sebaliknya, di desa dengan kapasitas aparatur yang rendah ditemukan kendala seperti dokumentasi keuangan yang buruk, kurangnya akses masyarakat terhadap informasi, serta partisipasi warga yang minimal, sehingga pemanfaatan Dana Desa kurang optimal hasil yang sejalan dengan penelitian di Nagari Limo Kaum yang menunjukkan bahwa rendahnya transparansi dan partisipasi masyarakat membatasi kontribusi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan teknis dan manajerial, peningkatan aksesibilitas dan transparansi informasi keuangan desa, serta pengembangan mekanisme partisipatif dan kolaboratif bersama masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program ketahanan pangan berbasis Dana Desa dan mewujudkan pembangunan pedesaan yang inklusif serta berkelanjutan.

Kata Kunci: Kapasitas Aparatur Desa, Dana Desa, Ketahanan Pangan, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Publik.

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan di tingkat pedesaan merupakan aspek strategis bagi pembangunan nasional, karena desa memiliki pemahaman mendalam tentang potensi lokal dan kebutuhan kontekstual masyarakat sehingga melalui kebijakan dan intervensi yang tepat, desa diharapkan mampu mewujudkan kemandirian pangan, memenuhi kebutuhan dasar penduduk, meningkatkan kesejahteraan, serta menjaga stabilitas sosial.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), terjadi perubahan paradigma: desa tidak lagi semata-mata objek pembangunan, tetapi menjadi subjek yang memiliki wewenang dan sumber daya untuk mengatur pembangunan sesuai karakteristik dan kebutuhan lokal. UU Desa menjadikan desa sebagai unit pemerintahan otonom dengan kewenangan untuk mengurus pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan keuangan dan aset desa (Peraturan BPK, 2014).

Dalam konteks tersebut, dana yang dikenal sebagai Dana Desa (DD) menjadi instrumen vital bagi desa untuk membiayai program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal termasuk potensi usaha agraris atau kegiatan ketahanan pangan berbasis komunitas. Melalui DD, desa dapat mengalokasikan sumber daya untuk mendukung ketahanan pangan, usaha agraris berskala rumah tangga, dan kegiatan produktif lainnya (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017).

Namun demikian, banyak penelitian empiris menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan dana saja tidak menjamin keberhasilan program di lapangan. Pelaksanaan yang optimal sangat ditentukan oleh aspek tata kelola termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur desa, serta mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik (Jurnal FISIP Unjani, 2020; Jurnal S-Tekom, 2021).

Penelitian terkini menambahkan bahwa faktor partisipasi masyarakat, kolaborasi multi-aktor, transparansi dan akuntabilitas secara signifikan mempengaruhi kualitas governance keuangan desa yang pada akhirnya menentukan efektivitas pemanfaatan DD dalam mendukung pembangunan desa termasuk ketahanan pangan (Susanti, Sujianto, Tua, As'ari, & Yulia, 2025).

Dengan demikian, terdapat kesenjangan (gap) antara potensi kebijakan (UU Desa + Dana Desa) dengan realitas di lapangan. Dana dan regulasi memberi peluang, tetapi

tanpa governance yang baik dalam arti manajemen keuangan yang tepat, perencanaan partisipatif, transparansi, akuntabilitas, kolaborasi, dan keterlibatan masyarakat program seperti ketahanan pangan pedesaan berisiko gagal atau hanya berdampak minimal.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengeksplorasi dan menguji sejauh mana kapasitas aparatur desa dan praktik tata kelola (governance) termasuk partisipasi masyarakat, kolaborasi multi-aktor, transparansi, akuntabilitas mempengaruhi efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam mendukung ketahanan pangan pedesaan. Diharapkan hasil penelitian akan memberikan bukti empiris atas peran governance desa serta rekomendasi kebijakan dan praktik penguatan kapasitas agar Dana Desa dapat berfungsi optimal demi kesejahteraan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif karena memungkinkan peneliti menggambarkan kondisi sosial dan kelembagaan desa secara alami dan kontekstual, serta mengeksplorasi dinamika-detail dalam tata kelola penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan (Sugiyono, 2020: 9–10). Desain deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menafsirkan fenomena bagaimana kapasitas aparatur desa mempengaruhi efektivitas pemanfaatan Dana Desa, bukan untuk menguji hubungan numerik atau generalisasi kuantitatif (Bogdan & Biklen dalam Sugiyono, 2020: 7).

Lokasi penelitian adalah beberapa desa di Kabupaten Rokan Hulu yang dipilih secara purposif (criterion/purposeful sampling), dengan kriteria memiliki program ketahanan pangan berbasis Dana Desa, variasi tingkat kapasitas aparatur desa, serta aksesibilitas lapangan dan ketersediaan dokumentasi yang memadai teknik purposive sampling ini lazim digunakan untuk memilih “kasus kaya informasi” dalam penelitian kualitatif implementasi kebijakan atau pemerintahan desa (Palinkas et al., 2015). Subjek / informan penelitian meliputi perangkat desa yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan Dana Desa (misalnya kepala desa, sekretaris desa, bendahara/kaur keuangan, Ketua TPK) serta tokoh masyarakat, pendamping desa, dan warga penerima manfaat program; jumlah informan disesuaikan dengan prinsip data saturation atau kejenuhan data, yakni ketika tidak ada temuan baru dari informan tambahan.

Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi: observasi partisipatif, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen perencanaan dan pelaporan Dana Desa (misalnya RPJMDes, RKPDes, APBDes, laporan realisasi, dan dokumen program ketahanan pangan). Pendekatan triakan (gabungan banyak teknik) dipilih untuk memperoleh perspektif yang beragam dan memadai dalam memahami kompleksitas praktik pemerintahan desa (observasi, wawancara, dokumentasi), sesuai prinsip triangulasi dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan kredibilitas dan kedalaman data (Denzin, 2009 dalam Denzin & Lincoln; serta berbagai penelitian tentang validitas data kualitatif).

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, yang membagi proses analisis data ke dalam tiga tahap utama: reduksi data (data reduction / condensation), penyajian data (data display / data presentation), dan penarikan kesimpulan / verifikasi (drawing conclusions / verification). Proses ini berlangsung secara interaktif dan berulang sepanjang pengumpulan data artinya analisis dilakukan bersamaan dengan pengumpulan untuk menjaga konsistensi dan mendalami makna fenomena. Model ini telah banyak digunakan dalam penelitian sosial/kualitatif di Indonesia maupun secara internasional. (Miles, Huberman & Saldaña, 2014: 8–16).

Untuk menjamin keabsahan dan keandalan temuan (trustworthiness/credibility), penelitian ini mengimplementasikan beberapa teknik validasi: triangulasi sumber dan teknik (membandingkan data dari perangkat desa, masyarakat, dokumen; serta dari observasi, wawancara, dokumentasi), member check yaitu konfirmasi kembali temuan ke informan untuk memastikan interpretasi sesuai pengalaman mereka serta peer debriefing / diskusi sejawat untuk menjaga objektivitas analisis (Lincoln & Guba 1985 model; serta literatur metode penelitian kualitatif kontemporer)⁶. Peneliti juga menjaga etika penelitian dengan memperoleh persetujuan informan, menjaga kerahasiaan identitas, serta menyajikan data dan interpretasi secara jujur dan transparan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas aparat desa berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Rokan Hulu. Desa yang memiliki tata kelola baik terutama dalam

perencanaan partisipatif, transparansi keuangan, dan kolaborasi komunitas menunjukkan capaian program yang lebih optimal. Hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa governance desa menjadi faktor utama kesuksesan pembangunan pedesaan (Anirwan & Irawansyah, 2022; Susanti dkk., 2025).

Pada indikator perencanaan partisipatif, Desa Alahan (desa berkembang) telah melibatkan masyarakat secara aktif dalam musyawarah desa mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi program. Kegiatan ini membuat program ketahanan pangan lebih tepat sasaran karena berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian di Kabupaten Tapanuli Utara yang membuktikan bahwa partisipasi publik memperkuat efektivitas pemanfaatan Dana Desa (Jurnal Ilmiah IBIK, 2023). Sebaliknya, di Desa Ulak Patin (desa tertinggal), rendahnya partisipasi warga akibat kurangnya sosialisasi dan komunikasi berakibat pada ketidakpahaman tujuan program (Villages, 2021).

Pada aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan, Desa Alahan telah menyediakan akses terbuka terhadap dokumen anggaran melalui papan informasi dan media komunikasi desa sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Kondisi ini mendukung temuan bahwa keterbukaan informasi anggaran berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa (Jurnal FISIP Untad, 2024). Namun di Desa Ulak Patin, minimnya dokumentasi dan akses publik menunjukkan bahwa implementasi regulasi transparansi masih menjadi tantangan, sebagaimana juga diidentifikasi dalam penelitian lain (ResearchGate, 2022).

Selanjutnya pada indikator kolaborasi multi-aktor, Desa Alahan berhasil membangun sinergi antara aparat desa, kelompok tani, dan masyarakat penerima manfaat sehingga program bisa berjalan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan argumen bahwa penguatan kelembagaan komunitas meningkatkan keberhasilan pembangunan pangan desa (Jurnal Ilmiah IBIK, 2023). Sebaliknya, Desa Sialang Jaya dan terutama Desa Ulak Patin masih sangat bergantung pada pendamping desa dari luar sehingga program kurang mandiri dan memiliki risiko tidak berkelanjutan, sebagaimana juga ditemukan dalam kajian evaluasi Dana Desa nasional (ResearchGate, 2022).

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa besarnya Dana Desa tidak secara otomatis menjamin keberhasilan ketahanan pangan. Faktor penentu utamanya

adalah kapasitas tata kelola aparatur desa dalam menerapkan nilai keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, dan kolaborasi (Susanti dkk., 2025; Jurnal Ilmiah IBIK, 2023). Dengan demikian, penguatan kapasitas aparatur desa menjadi agenda strategis agar Dana Desa dapat memberikan dampak nyata terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kapasitas aparatur desa memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Rokan Hulu. Perbedaan capaian di Desa Alahan, Desa Sialang Jaya, dan Desa Ulak Patin menunjukkan bahwa alokasi dana yang sama tidak menjamin keberhasilan program apabila tidak diikuti oleh kualitas tata kelola pemerintahan desa yang memadai.

Desa Alahan yang menerapkan perencanaan partisipatif, transparansi keuangan, serta kolaborasi dengan kelompok masyarakat mampu menunjukkan hasil yang lebih optimal, baik dalam ketepatan sasaran maupun keberlanjutan program ketahanan pangan. Desa ini membuktikan bahwa kapasitas aparatur yang adaptif dan responsif berkontribusi langsung pada peningkatan produksi pangan serta partisipasi warga sebagai penerima manfaat aktif.

Berbeda dengan itu, Desa Sialang Jaya yang berstatus desa maju justru belum mengoptimalkan tata kelola secara konsisten sehingga efektivitas program ketahanan pangan belum maksimal. Sementara Desa Ulak Patin, sebagai desa tertinggal, menghadapi kendala serius pada aspek administrasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat, yang berdampak pada rendahnya kepercayaan publik dan banyaknya program yang tidak berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan berbasis Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas kapasitas aparatur desa dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kolaborasi. Penguatan kapasitas aparatur desa secara berkelanjutan menjadi langkah strategis agar

program ketahanan pangan mampu mendorong kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat kapasitas aparatur desa melalui pelatihan yang berkelanjutan terkait perencanaan partisipatif, pengelolaan keuangan yang akuntabel, serta pelaporan yang transparan agar aparatur desa mampu mengelola Dana Desa secara mandiri tanpa ketergantungan tinggi pada pendamping eksternal. Pemerintah desa juga diharapkan meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui forum musyawarah yang inklusif pada setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program ketahanan pangan. Upaya ini penting untuk mendorong tumbuhnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap program, sehingga pengawasan dan keberlanjutan program dapat terjamin. Selain itu, transparansi informasi perlu terus diperluas melalui pemanfaatan papan informasi desa, media sosial, dan kanal komunikasi lainnya agar masyarakat dapat mengakses informasi dan mengetahui perkembangan penggunaan anggaran desa secara terbuka.

Saran lainnya adalah pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi desa, seperti kelompok tani dan BUMDes, untuk mengoptimalkan dukungan bagi program ketahanan pangan secara berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada peran aparatur desa. Dibutuhkan pula mekanisme evaluasi program yang lebih terstruktur serta melibatkan masyarakat, pendamping desa, dan pemerintah kecamatan sehingga pelaksanaan program dapat terpantau dan terukur secara baik. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah hendaknya dirancang dengan mempertimbangkan status perkembangan desa, seperti memberikan pendampingan intensif pada desa tertinggal serta mendorong inovasi pembangunan pada desa berkembang dan maju. Untuk memperkaya wawasan ilmiah, penelitian selanjutnya disarankan menambah jumlah lokasi penelitian dan mengembangkan pendekatan kuantitatif guna memperoleh hasil pembuktian yang lebih luas dan mendalam mengenai hubungan kapasitas aparatur dengan efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam mendukung ketahanan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anirwan, A., & Irawansyah, I. (2022). *Akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa*. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 2(1), 56–68.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative research for education: An introduction to theories and methods* (5th ed.). Pearson Education.
- Denzin, N. K. (2009). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (4th ed.). Aldine Transaction.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2017). *Pedoman umum penggunaan Dana Desa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Jurnal FISIP Unjani. (2020). [*Judul artikel terkait pengelolaan Dana Desa*]. *Jurnal FISIP Unjani*.
- Jurnal S-Tekom. (2021). [*Judul artikel terkait efektivitas Dana Desa*]. *Jurnal S-Tekom*.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed-method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544.
- Peraturan BPK. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretatif, interaktif, dan konstruktif*. Alfabeta.
- Susanti, D., Sujianto, S., Tua, H., As'ari, H., & Yulia, D. (2025). Impacts of community participation, multi-actor collaboration, transparency, and accountability on village financial governance in Rokan Hulu, Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 234–250. <https://doi.org/10.26618/ojip.v15i1.15900>
- Susanti, D., Tua, H., & As'ari, H. (2024). Pengaruh penerapan transparansi dan akuntabilitas terhadap kebijakan pengelolaan alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 244–264.